Rivalitas Prancis-Amerika Serikat di NATO dan Implikasinya terhadap Agenda Keamanan Global Pasca Integrasi Prancis di Struktur Militer NATO

ADI RIO ARIANTO
Dosen di UPN Jakarta
arianto.adirio@gmail.com

ABSTRACT

The main focus of this study is to analize the three issues: (1)to understand the conflict of interests between France and US in the NATO,(2)to understand the behavior and the powerof France and US in the NATO, and (3)to examine their effects on the shape and performance of NATO policy in viewing of global security. The reentry of France in the military structure of NATO in 2009 represents a major transformation in the strategic thinking of US as well as bringing great effect for NATO's political balance of power between France and the US. This is to keepthe performance of NATO toward the agenda of global security post-Cold War.

***Keywords**: France, US,power, security, NATO*

ABSTRAK

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa tiga isu: (1) untuk memahami konflik kepentingan antara Perancis dan Amerika Serikat dalam NATO, (2) untuk memahami perilaku dan kekuatan Perancis dan Amerika Serikat dalam NATO, dan (3) untuk memeriksa efeknya dalam pembentukan dan kebijakan NATO dalam melihat keamanan global. Masuknya kembali Perancis ke dalam NATO pada tahun 2009 menampilkan transformasi besar dalam pemikiran strategis Amerika Serikat yang juga membawa efek besar bagi keseimbangan kekuatan NATO antara Perancis dan Amerika Serikat. Hal ini ditujukan untuk mempertahankan performa NATO dalam agenda keamanan global pasca Perang Dingin.

Kata kunci: Perancis, Amerika Serikat, keamanan, NATO

I. PENDAHULUAN

Terbentuknya Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization* disingkatNATO), 4 April 1949 telah membawa paradigma baru bagi dunia internasional dalam memahami postur,dinamika, dan ancaman baru terhadapkeamanan internasional. Sejak terjadinya Perang Dunia I (1914-1918), menyusul Perang Dunia II (1939-1945), hingga Perang Dingin yang berakhir pada runtuhnya Tembok Berlindan penyatuan kembaliJerman Barat-Timur (1990),kondisi keamanan internasional mengalami bentuk polarisasi kekuatan. Pada ketiga perang yang disebutkan di atas, NATObaru terlibat dalam Perang Dingin sebab organisasi ini baru dibentuk pada pasca Perang Dunia II.

Pada awal pembentukannya,NATOberanggotakan dua belas negara penandatangan yaitu Prancis, Amerika Serikat (AS), Belanda, Inggris, Belgia, Denmark, Italia, Kanada, Luxemburg, Norwegia, Portugal, dan Islandia. Prancis dan ASmerupakan negara paling berpengaruh dalam memobilisasi keamanan internasional baik melalui NATO dan PBB, dan merupakan dua diantara limanegara pemegang hak veto PBB.*North Atlantic Treaty Organization* juga disebut dengan nama *Washington Treaty*.Prancis menyebut pakta ini *L'organisation du Traite de L'atlantique Nord*, disingkat OTAN sekaligus mewakili dominasi Prancisdi NATO. Sedangkan, AS menyebutnya*North Atlantic Treaty Organization*, disingkat NATOsekaligus mewakili dominasi AS. Meskipun demikian, pada tahun 1966 Prancis dan Jerman membentuk pertahanan bersama di luar NATO melalui pendirian hubungan *Franco-German*sebagai tindak lanjut dari Elysee Treaty 1963 yang selanjutnya menjadi konsep dasar bagi pembentukan pertahanan dan kemanan Eropa tahun 1996 (Augustin,2007:19). Kolaborasi pakta pertahanan ini menunjukkan adanya pengaruh dari dua kekuatan Eropa yang baru—Prancis dan Jerman—sekaligus membentuk kemandirian Eropa dalam bidang pertahanan dan keamanan (Augustin,2007:19).

Pada perkembangannya, NATO telah terlibatdalambeberapa perang dan konflik yang melibatkan kepetingan Prancis dan AS.Dengan demikian, dominasi dan perebutan peran antara Prancis dan AS menjadi tak terelakkan di NATO.Dalam pandanganAS,Prancismerupakankunci utama untuk mengendalikankekuatan Eropa di NATO.Sebaliknya, dalam pandanganPrancis,ASdianggap sebagai penghambat dalam menentukan kemandirian Eropa (Sarkozy,2008:www.ambafrance-ca.org). Oleh karena itu, Prancis mengadakan perimbangan kekuasaan baru di NATO. Kondisi ini tentu saja akan memberi efek pada NATO dalam menyelesaikan isu keamananregional dan internasional.Dengan demikian, secara spesifik studi ini berpijak pada pertanyaan

penelitian utama, yaitubagaimanapengaruh Prancis dan ASdi NATO dan implikasinya terhadap agendakeamanan globalpasca integrasi Prancis di struktur militer NATO?

II. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam tulisan ini yaitu (1)konsep"*power*", digunakan untuk menelaah aktor berpengaruh di NATO. Konsep ini menekankan pada peran aktor-aktor berpengaruh dalam penentuan kebijakan keamanan NATO; (2)konsep "*national interest*" digunakan untuk menelaah kepentingan aktor-aktor berpengaruh di NATO; dan (3)konsep "*decision making process*" digunakan untuk melihat bagaiman proses pembuatan dan pengambilan kebijakan aktor-aktor berpengaruh terhadap agenda keamanan NATO dan pengaruh kebijakan tersebut terhadap agenda keamanan internasional.

Makna *power*menurutMorgenthausebagai suatu hubungan antara dua aktor politik, dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan segala pikiran dan tindakan aktor B. Selanjutnya, iamenjelaskan bahwa Powerialah hubungan psikologis antara mereka yang menjalankannya dengan mereka atas siapa ia dijalankan.Ia memberikan kepada yang disebut pertama penguasaan atas tindakan tertentu dari yang disebut belakangan melalui pengaruh yang digunakan oleh yang disebut pertama kepada pikiran dari yang disebut belakangan. Pengaruh itu mungkin digunakan melalui perintah, ancaman, bujukan, atau kombinasi dari ketiganya (Morgenthau,1949:16).Adapun, defenisi*power* lebih luas dikemukakan oleh Jr. Chas W. Freeman: *The power of states is measured by their ability to alter and chanel the behaviour of other states. It rest on their will to apply their national strength and potential in contest with other. A state's estimate of its own power helps decide the degree to which it will insist on its views and take risks to see them prevail*(Sriyono,2004:163).Sedangkan, menurut Deutschmakna *power* dapat dibagi ke dalam tiga variabel: wilayah, intensitas, dan ruang lingkup kekuasaan (Mas'oed,1990:121). Kekuatan nasional dari setiap negara dapat disusun berdasarkan peringkatnya, baik itu kekuasaan aktual ataupun yang potensial. Untuk itu, *power* dibedakan atas, *superpower*, *great power*, *middle power*, dan *small power*.

Adapun, makna kepentingan nasional dari setiap negara adalah mengejar kekuasaan (Morgenthau,1949). Kekuasaan yang dimaksud adalah apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat diciptakan melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama.Morgenthau menekankan konsep kepentingan nasional pada kelangsungan

hidup dari suatu negara. Setiap negara harus mampu mempertahankan integritas teritorialnya (identitas fisik), rezim ekonomi-politiknya, dan memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dan sejarahnya (identitas kultural). Dengan demikian, pemimpin negara menurunkan kebijaksanaan yang sifatnya spesifik terhadap negara lain, misalnya perimbangan kekuatan, perlombaan senjata, pemberian bantuan asing, pembentukan aliansi kekuatan, dan atau perang ekonomi dan propaganda.Menurut Wolfers, kepentingan nasional berupakeutuhan wilayah suatu bangsa,kemerdekaan, dan kelangsungan hidup nasional. Namun, kelangsungan hidup nasional itu sendiri diberi bermacam-macam interpretasi oleh bermacam-macam negara yang menghadapi kondisi yang berlain-lainan (Dougherty-Pfatzgraff,1971:62).

Adapun, proses pengambilan keputusandalam hal ini,Cox dan Jacobsonmenjelaskan bahwa, proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi internasional dapat dibedakan menurut klasifikasi yaitu *representational decisions, programmatic decisions, rule-creating decisions, operating decision, rule-supervisory decisions, boundry decision*, dan terakhir, *symbolic decision*(Rudy,2002:79-80).Lebih lanjut, Cox dan Jacobsonmelihat bahwa, dalam setiap pengambilankeputusan terdapat banyak alternatif yang dapat mempengaruhi pihak pengambil keputusan. Para aktor dituntut lebih jeli dalam memilih alternatif yang ada untuk membuat, memutuskan dan mempengaruhi kebijakan.*Representational decisions*merupakan keputusan yang akan mempengaruhi keanggotaan dalam suatu organisasi internasional serta merupakan perwakilan dalam badan-badan internal (Rudy,2002:79-80). Keputusan ini meliputi keputusan mengenai pengakuan dan atau pengeluaran anggota dalam organisasi, pengesahan suatu mandat, penentuan wakil-wakil yang duduk dalam badan-badan eksekutif serta komite. *Programatic decisions*merupakan keputusan dari suatu alokasi strategis dari sumber-sumber organisasi yaitu hasil negosiasi antaraktor menyangkut tujuan serta penekanan terhadap program-program organisasi. *Rule-creating decision*merupakan keputusan yangberkenaan dengan pembentukan norma-norma atau aturan-aturan dalam ruang lingkup organisasi. Hasil dari keputusan ini biasanya bersifat formal seperti konvensi, persetujuan ataupun resolusi.*Symbolic decision*merupakan suatu keputusan yang penekanannya pada isu-isu simbolik terhadap penerimaan suatu tujuan ataupun ideologi yang didukung oleh suatu kelompok aktor ataupun legitimasi yang telah diterima oleh elit-elit yang dominan.

III. NATO DALAM DIMENSI TRADISIONAL DAN NON-TRADISIONAL

a. NATO dalam Dimensi Tradisional

North Atlantic Treaty Organization (NATO) secara tradisional dipahami dalam bentuk kerangka kerja Perang Dingin. NATO pada periode Perang Dinginialah pengimbangterhadap kekuatan blok Timur yang teraliansi dalam Pakta Warsawa.Adapun, NATO merupakan aliansi negara-negara blok Barat sekutu AS. Perkembangan hubungan internasional pada kurun waktu sejak berakhirnya Perang Dunia II tak lepas dari kerangka kerjaPerang Dingin.

Pada dasarnya, NATO merupakan suatu aliansi militer antarpemerintah yang menerapkan sistem *collective defense* dimana negara anggotanya setuju untuk melakukan pertahanan bersama sebagai respon terhadap ancaman eksternal. Secara tradisional, ancaman eksternal NATO ialah agresi Uni Soviet dan Pakta Warsawa.Tujuan dasar NATO secara formal terdapat dalam mukaddimah *North Atlantic Treaty*, yaitu menjaga negara naggotanya dalam kesipasiagaan militer. Sedangkan, misi NATO selama Perang Dingin menurut Marco Rimanelli, ialah"*NATO's slow response to outside threats reflected its consesnus-based on three missions during the Cold War period: conventional and nuclear self-defense against the Soviet-Warsaw Pact threat; regional alliance-building and forces standardisation; and integration of new members"* (Rimanelli, 2009:21).Lebih spesifik lagi, Sekretaris Jenderal NATO yang pertama, Lord Ismay, menyatakan bahwa tujuan utama NATO ialah "*to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down*" (Firdausy,1998:72). Bagi Eropa, tujuan dasar NATO ialah untuk memulihkan kepercayaan Eropa kepada Amerika PascaPerang Dunia II (*to keep the Americans in*). Bagi Amerika, fokusnya untuk menghalangi agresi Soviet, atau menjaga Rusia tetap di luar (*to keep the Russians out*). Selanjutnya, untuk menjaga Jerman tidak bangkit kembali secara militer (*to keep the Germans down*) yang diinterpretasikan secara bertahap dengan menghubungkan Jerman dalam suatu institusi multilateral Eropa.

Struktur NATO terdiri atas (1)*North Atlantic Council*, terdiri dari *Foreign, Economic*, dan *Defense Minister*, yang memutuskan masalah-masalah terkait kebijakan politik militer; (2)*Military Committe*, terdiri dari *chief staff of member countries*, yang menformulasikan kebijakan startegi militer atas pertimbangan dari Dewan; dan (3)*Staff Secretariat* dikepalai oleh seorang *Secretary General*(Ziring, Plano, dan Olton,1995:179).Hingga saat ini NATO memiliki 28 anggota: tahun 1949: Norwegia,

Belgia, Kanada, Denmark, Islandia, Luxembourg, Portugal Italia, Belanda, Iggris, Prancis dan AS; tahun 1952: Yunani dan Turki; tahun 1955: Jerman Barat; tahun 1982: Sapnyol; tahun 1999: Republik Ceko, Polandia, Hongaria; tahun 2002-2004: Estonia, Bulgaria, Latvia, Lithuania, Rumania, Slowakia, Slovenia; tahun 2008: Albania dan Kroasia.

Secara tradisional, keberadaan NATO tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian peperangan tahun 1945. Penyelesaian tahun 1945 yang mengakhiri kekerasan Perang Dunia II dalam waktu yang sama menciptakan awal dari periode Perang Dingin. Adapun, secara garis besar, paradigma Perang Dingin 1949-1989 dijelaskan oleh Juwono terbagi dalam beberapa tahap perkembangan. Juwono menilai secara politis Perang Dingin terbagi atas tahap 1947-1963 dengan beberapa puncak persitiwa seperti Blokade Berlin 1949, Perang Korea 1950-1953, Krisis Kuba 1962 dan Perjanjian Proliferasi Nuklir 1963 (Mariani, 2004:56). Selanjutnya selama Perang Vietnam 1965-1975, paradigma Perang Dingin terbatas pada persaingan berkelanjutan antara AS dan Uni Soviet di beberapa kawasan strategis dunia. Pada Era Perang Dingin, dominasi Uni Soviet dan AS terhadap negara sekutunya menyebabkan konstalasi hubungan internasional diwarnai oleh kepentingan kedua negara. Persaingan antara keduanya mempertajam "*balance of power"* secara global pada pasca Perang Dunia II. Kepemilikan senjata nuklir oleh AS dan Uni Soviet memastikan bahwa perang berpotensi membawa malapetaka bagi kedua blok. Sebab, mengancam kelangsungan hidup manusia dengan menggunakan senjata nuklir, strategi milter sering merujuk "*balance of power* sebagai *balance of terror*"(Lasas, 2008:98-116).

b. NATO dalam Dimensi Non-Tradisional

Pada pasca Perang Dingin, konsep NATOyang pada awalnya merupakan sebuah aliansi militer (*traditional purpose*) berubah menjadi sebuah aliansi yang memiliki multi tujuan (*non-traditional purpose)*.Setelah jatuhnya Uni Soviet dan Pakta Warsawa, tidak ada lagi ancaman. NATO dianggap kehilangan relevansi. Pada perkembangannya, NATO justru mengadopsi suatu agenda global dan memperluaskeanggotaannya hingga memasukkan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya melalui pertemuan KTT NATO.

Tujuan NATO yang tertuang dalam*New Strategy Concept* dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu tujuan politik dan militer. Tujuan politikNATO adalah mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan mendorong usaha-usaha konsultasi dan kerja sama dalam bidang militer dan keamanan. Sedangkan, tujuan militer adalahNATO

berkomitmen menjaga perdamainan dan meresolusi konflik.Ini dijelaskan dalam artikel 5 dari Perjanjian Atlantik Utara.Tujuan ini sesuai dengan hasil dari pertemuan tingkat tinggi di Roma pada tahun 1991menurut "*Declaration on Peace and Cooperation*, 08 November 1991" yaitu (1)menetapkan dasar lingkungan keamanan yang stabil di Eropa, berupa institusi demokrasi dan resolusi perdamaian, (2)menciptakan lingkungan untuk mencegahnegara lain mengintimidasi atau memaksa negara-negara Eropa menjatuhkan hegemoni melalui suatu ancaman atau penggunaan kekuatan, (3)menurut artikel 4 dari *North Atlantic Treaty*, tugas aliansi sebagai suatu forum konsultasi atau dialog trans-atlantik bagi para anggota, termasuk mencegah bahaya keamanan mereka, (4)aliansi menyelengarakan penangkalandan pertahanan melawan setiap tindakan agresi yang mengancam wilayah negara anggota NATO, dan (5)aliansi mempertahankan suatu strategi yang seimbang di Eropa.

Selanjutnya pada tahun 1999, konsep strategi NATO mengalami revisi untuk yang kedua kalinya yang menyangkut bidang politik, yaitu (1)pendekatan yang lebih luas terhadap keamanan termasuk di dalamnya faktor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, juga dalam bidang pertahanan, (2)komitmen yang kuat kepada hubungan *Trans-Atlantic*, (3)memperbaiki dan memelihara kapabilitas militer aliansi untuk memastikan efektifitas operasi militer, (4)pengembangan kapabilitas negara-negara Eropa di dalam aliansi, (5)terjaganya tindakan pencegahan konflik yang memadai dan prosedur serta srtuktur manajemen krisis yang baik, (6)kemitraaan yang efektif dengan negara-negara non-NATO berdasarkan kerjasam dan dialog, (7)perluasan aliansi dan pelaksanaan kebijakan pintu terbuka pada negara yang berpotensi menjadi anggota baru, dan (8)melanjutkan usaha-usaha terhadap kesepakatan yang menyangkut pengawasan, kesepakatan perlucutan senjata, dan nonpoliferasi (*NATO Handbook* 2006, "*NATO's Public Diplomacy Division*":19).

Revisi tujuan NATO untuk yang ketiga kalinya terjadi pada KTT Lisabon 2010 (*NATO New Strategic Concept*,2010: 1), yang di dalamnya terdiri atas 38 point. Inti poinnya, yaitu: (1)menegaskan ikatan antara negara anggota untuk membela satu sama lain terhadap setiap ancaman dan keselamatan warga negara, (2)berkomitmen untuk mencegah krisis, mengelola konflik dan menstabilkan situasi pasca konflik, termasuk bekerja lebih erat dengan mitra internasional: PBB dan UE, (3)menawarkan mitra di seluruh dunia melalui keterlibatan politik aliansisesuai dengan berkontribusi anggota, (4)NATO berkomitmen untuk tujuan menciptakan kondisi sebuah dunia tanpa senjata nuklir, tetapi menegaskan bahwa, selama ada senjata nuklir di dunia, NATO akan tetap menjadi aliansi

nuklir, (5)menyatakan kembali komitmen perluasan keanggotan NATO terbuka bagi semua negara demokrasi Eropa yang memenuhi standar keanggotaan, dan (6)NATO melakukan reformasi menuju aliansi lebih efektif, efisien dan fleksibel, sehingga mampu menangkal ancaman untuk mencapai tingkat keamanan maksimum.

Menurut Rimanelli, perubahan paling mendasar yang terjadi dalam struktur kelembagaan NATO pasca Perang Dingin dilihat dalam tiga hal. Pertama, integrasi regional dan perluasan keanggotaan NATO. Kedua, struktur kelembagaan keamanan yang baru, seperti *North Atlantic Cooperation Council* (NAC-C), *Partnership for Peace* (PFP), *Euro Atlantic Partnership Council* (EAPC), *dan NATO-Russia dan NATO-Ukraina Charter*. Ketiga, area misi keamanan NATO diperluas. Termasuk, keberhasilan NATO dalam menata ulang sistem pertahanan regional dan reduksi kontrol senjata NATO (*arms control rduction*). NATO dalam hal reduksi kontrol senjata merupakan sebuah perubahan doktrin dan strategi militer NATO yang paling signifikan, di mana doktrin yang sebelumnya terletak pada dua pilar "*forward defense*" dan "*flexible response*". Kemudian, dalam konferensi NATO pada Juli 1990 dan November 1991,doktrin-ini diubah secara radikal dari konsep *forward defense* menjadi "*reduced forward presence*" dan "*flexible response"* menjadi "*reduced reliance on nuclear weapons*", dan akhirnya menjadi "*truly weapons of last resort*" (Firdausy,1998:74).

Pada pasca Perang Dingin, kebijakan NATO didasarkan pada tujuan mengintegrasikan kembali Eropa yang terpecah. Pada pertemuan puncak NATO di awal 1990-an di London dan Roma, negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang telah memenangkan kemerdekaan menjadi bagian pelengkap bagi strategi aliansi. Pertemuan London sekaligus secara resmi mengakhiri Perang Dingin antarblok dan membangun kembali hubungan bilateral antara AS dengan negara bekas Uni Soviet (Rimanelli,2009:19). Keputusan penting yang keluar dari puncak ini adalah pembentukan Dewan Kerjasama Atlantik Utara. Pada tahun 1992, 11 negara Eropa sebagai mantan anggota Uni Soviet, termasuk Georgia dan Albania masuk dalam keanggotaan NATO. Pada KTT Brussel 1994, kebijakan kemitraan untuk Perdamaian (PFP) diperkenalkan. Di Paris tanggal 27 Mei 1997, pembuatan undang-undang kerjasama keamanan NATO dan Federasi Rusia ditandatangani, dan hasilnya tahun 2002 Dewan NATO-Rusia didirikan.

IV. NATO DALAM PERSPEKTIFPRANCIS DAN AMERIKA SERIKAT

a. NATO dalam Perspektif Prancis

Sebagai salah satu dari dua belas negara penandatangan berdirinya Pakta Pertahanan Atlantik Utaratahun 1949, keberadaan Prancis di NATO dengan baik dapat dijelaskan dalam 4 (empat) posisi. Pertama, pada periode Perang Dingin, dimana Prancis berada di dalam struktur integrasi militer NATO sejak berdirinya hingga pada periode Perang Dingin (1949-1966). Dan, berada di luar struktur integrasi militer NATO hingga periode akhir Perang Dingin (1966-1990). Kedua, pada periode pasca Perang Dingin, dimana Prancis berada di luar struktur integrasi militer NATO (1990-2009). Dan, sejak tahun 2009 sampai sekarang, Prancis telah kembali berada di struktur integrasi militer NATO.

Pada empat posisi di atas, tentu saja Prancis memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam melihat NATO, terutama pada periode akhir Perang Dingin hingga sekarang. Perbedaan mendasar sebagai tolak ukur hubungan Prancis dan AS pada periode Perang Dingin adalah tentang proyeksi NATO dalam menangkal ancaman yang sama bagi negara anggota NATO.Selanjutnya, ketika Perang Dingin usai, maka ancaman bersama sudah tidak ada. Dengan demikian peran Prancis bersama anggota NATO lainnya juga mengalami perubahan. Perubahan kondisi ini turut mempengaruhi perkembangan hubungan kedua negara. Pada periode Perang Dingin, khususnya tahun 1963,Prancis dan Jerman menandatangani perjanjian *Elysse* di Paris kemudian terbentuklah hubungan Franco-German. Adapun, pengaruh implementasi perjanjian ini terhadap postur pertahanan keamanan Prancis di masa tersebut adalah Prancis lebih leluasa membangun kemandirian Pertahanan Eropa bersama dengan Jerman. Efek hubungan kerjasama ini bagi Prancis hingga sekarang yaitu sama-sama menjadi representasi terkuat negara-negara Eropa di NATO.

Prancis masuk kembali dalam struktur integrasi militer NATO di tahun 2009 di bawah komando Presiden Nicholas Sarkozy. Hal ini menjadikan Prancis semakin lebih kuat di NATO dan Eropa. Walaupun, dapat dipahamibahwa di tahun 1966 Prancis keluar dari struktur militer NATO atas keputusan Presiden Prancis, Charles De Gaulle. Dan, membentuk pertahanan bersama Jerman di luar NATO. Pada masa-masa diluar struktur keanggotaan NATO, kurang lebih 43 tahun, Prancis melihat NATO sebagai wadah untuk memperkuat kepentingan Prancis dalam struktur politik NATO. Hal ini sesuai dengan tradisi “khas Prancis” dalam politik luar negeri yang merupakan kepentingan vital bagi Prancis yaitu mempertahanakan sikap independen Prancis di Eropa dan tetap menjalin kerjasama dengan mitra strategis, yaitu Jerman.

Selanjutnya, jika kita hubungkan dengan perkembangan kepentingan Prancis di NATO. Maka,kepentingan mendasarPrancis di NATO pada periode Perang Dingin adalah menjadi motor utama sebagai penggerak bersama dengan sekutu melawan ancaman ekternal.Selanjutnya, perkembangan kepentingan Prancis di NATO setelah pasca Perang Dingin menurut "*French White Paper on Defence and National Security, June 2008*", yaitu untuk menegaskan kepentingan Prancis di Eropa dan NATO, yaitu kepentingan yang menitikberatkan pada masalah pertahanan luar negeri, domestik, dan masalah keamananhubungannya dengan negara-nagara yang tergabung di NATO dan di Eropa (Portelli,dkk,2005:210).Pasca dibuatnya Buku Putih tahun 2008, Prancis mulai melakukan restrukturisasi besar untuk mengembangkan profesionalisme militer yang lebih ramping, lebih cepat,tangguh, dan lebih berbobotyang telah disesuaikan untuk operasi di luar daratan Prancis.Elemen kunci dari restrukturisasi termasuk mengurangi personel, pangkalan, markas dan peralatan rasionalisasi dan industri persenjataan.Jumlah militer Prancisyang masih aktif dalam tugas sekitar 350.000 personel. Prancisberhasil menyelesaikan perpindahan semuaangkatan bersenjata profesional saat wajib militer berakhir pada 31 Desember 2002(Portelli, dkk,2005:199).

Kepentingan Prancis di NATO terus berkembang. UsahaPrancis membangun pertahanan Eropa telah dirancang sejak 1966 ketika Presiden Charles De Gaulle secara tegas menarik keluar Prancis dari srtuktur militer NATO. Sejak itu, Prancis mulai fokus membangun dasar bagi pertahanan Eropa di luar NATO bersama Jerman. Keluarnya Prancis dari Struktur militer NATO, tidak berarti Prancis meningalkan kepentingannya di NATO.Pada masa yang sama, Prancismulai berpartisipasi dalam struktur politik NATO hingga akhirnya tergabung kembali dalam struktur militer NATO tahun 2009 (Portelli, dkk,2005:198).

b. NATO dalam Perspektif Amerika Serikat

AS pada masa Perang Dingin memimpin NATO bersama sekutu dalam menangkal ancaman Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Dalam masa-masa ini, AS dan sekutu yang yang teraliansi dalam NATO berjuang bersama melawan fasisme yangterlibat dalam pertikaian politik untuk saling bersaing memperebutkan pengaruh di Eropa, Asia, dan dunia. AS gencar dalam usaha memperjuangkan hegemoni dalam tatanan politik global awal tahun 1950-an sampai runtuhnya komunisme Soviet tahun 1990-an. Runtuhnya Uni Soviet diikuti oleh disintegrasi Uni Soviet pada bulan Desember 1992, mengakhiri Perang Dingin

(1946-1990) dan keamanan global berubah secara radikal dibidang-bidang tertentu. Dengan dinyatakannyaAS sebagai negara adidaya tunggal sejak tahun 1992, dua fase paralel dari "akhir sejarah" dan "globalisasi", dilihat sebagai akhir dari Perang Dingin atas kemenangan divisimiliter politik Eropa dan kemenangan militer-ekonomi Barat melalui perdagangan dan pasar bebas (Rimanelli,2009:486).

Pada periode di bawah kepemimpinan AS, NATO berusaha mempertahankan perjanjian pengawasan senjataTimur-Barat dan memperbaharui sistem pembagian kekuasaan di Eropa antara negara adidaya dengan menyatakan bahwa Uni Soviet dan Pakta Warsawa tidak lagi menjadi musuh Amerika Serikat, sekaligus menciptakan kerjasama keamanan Timur-Barat melalui kerjasama *North Atlantic Cooperation-Council* (NAC-C) dan Organisasi untuk keamanan dan Kerjasama di Eropa ("*Organization for Security and Coopoeration in Europe*" disingkat OSCE) untuk mengikat NATO bersama dengan semua negara Eropa Timur.

Pada pasca Perang Dingin, babak baru NATO ialah bagaimana melihat peran AS untuk selalu menjadi yang dominan di NATO.AS ingin memposisikan NATO dibawah pengaruh dan kendalinya. Di sisi lain, negara-negara Eropa melihat dominasi AS di NATO sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan Eropa. Negara-negara Eropa melihat bahwa, jika dominasi AS dibiarkan terus-menerus, maka dominasi tersebut akan menjadi wujud kekuatan baru AS untuk menguasi Eropa. Dalam pandangan peneliti, hal ini memberi ruang untuk saling mendominasi.Sehingga, muncul paradigma/Teori Eropa I yaitu "meng-Amerikaserikat-kan NATO (*to make NATO under US*)" dalam situasi ini "jika dominasi AS di setiap kebijakan yang diambil oleh NATO terus meningkat, maka NATO akan menciptakan sebuah keseimbangan kekuatan yang baru bagi AS dan negara-negara Eropa yang akhirnya menciptakan ruang baru bagi AS untuk selalu mendominasi NATO secara keseluruhan (Arianto,2012:76)." Sebaliknya, pembalikan dominasi dari negara-negara Eropa terhadap AS untuk melawan dominasi AS merupakan paradigma/Teori Eropa II yaitu "me-NATO-kan Amerika Serikat (*to make US under NATO*)" yang diciptakan untuk menangkalatau sebagai respon atas dominasi AS di NATO (Arianto,2012:76).Bagi AS,mempertahankan kepemimpinan di NATO merupakan satu-satunya jalan untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di Eropa secara permanen. Konsep baru NATO, di satu sisi jika berhasil dibuat, akan memberikan ruang manuver bagi AS di arena internasional yang bersifat militeristik.Di sisi lain, memperlemah kekuatan fungsional DK PBB.

Hal di atas merupakan sebuah konflik struktural antara ASdan Eropa, dalam hal ini Prancis. Konflik struktural ini telah lama berlangsung sejak NATO didirikan, namun masih

dapat diantisipasi oleh NATO. Pada dasarnya, tantangan utama ke konsep dari Perjanjian Atlantik Utara diwujudkan dalam perjanjiannya.Dan bagaimanapun juga, konflik struktural antara Prancis dan AS yang terlibat dalam perjuangan untuk kepemimpinan NATO menjadi dasar dari kepentinganPrancis dan AS. Persiteruan ini nampak dalam hal kepemimpinan Prancis dan AS dalam setiap operasi NATO. Pada awal pendiriannya, Prancis menentang pemindahan markas besar NATO dari Paris ke Brussel. Sejak itu, Prancis juga menolak untuk berpartisi dalam latihan militer NATO (Ziring, Plano, dan Olton,1995:180).

V. PENGARUHRIVALITAS PERANCIS-AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEBIJAKAN KEAMANAN NATOPASCA PERANG DINGIN

a. Revitalisasi Kepentingan Prancis di NATO

Kepentingan Prancis di NATO tidak terlepas dari keikutsertaannya dalam berbagai operasi perdamaian yang dijalankan oleh NATO sejak tahun 1949. Sebagai salah satu negara pendiri NATO, Prancis telah banyak berkontribusi dalam hal pengiriman pasukan NATO.Di antara anggota NATO, Prancismerupakannegara yang paling intens dalam pengiriman pasukan luar negeri setelah AS (Portelli, dkk,2005:210). Prancis juga menjadi negara penting dalam berbagai reformasi kelembagaan NATO. Seiring dengan perubahan waktu, revitalisasi kepentingan Prancis di NATO menjadi agenda baru dalam politik luar negeri Prancis, khususnya di bidang pertahanan.Dukungan Prancisdalam upaya modernisasi struktur kelembagaan NATO dan memimpin kontributor *NATO Response Force* (NRF) merupakan bagian dari implementasi kepentingan Prancis di NATO.Di luar NATO, Prancismampu membangun kemampuan pertahanan Eropa, termasuk pengembangan kelompok tentara regu-cepat UE.

Pada tahun 2009,Presiden Nicholas Sarkozy mendukung penuh pengembangan pertahanan Eropa untuk melengkapi dan memperkuat NATO, yang tujuan intinya tetap padastabilisasi keamanan trans-atlantik. Di luar misi trans-atlantik, Presiden Nicholas Sarkozy telah menggarisbawahi komitmen Prancis untuk menyelesaikan misi NATO di Afghanistan, di mana sekitar 4.000 tentara Prancisdikirimke Afganistan pada bulan Januari 2011. Sebelumnya, pada Juni 2008 Paris sukses menjadi tuan rumah Konferensi Afghanistan.Dan, dukungan sukses bagi ketuan-rumahan Prancis menunjukkan bahwa Prancis memiliki kemampuan untuk memimpin misi NATO di luar Trans-Atlantik, dimana dalam konferensi tersebut donor internasional telah menjanjikan bantuansebesar $21 miliar

untuk mengembangkan infrastruktur Afghanistan, memerangi narkoba, kekerasan, dan kemiskinan (www.state.gov,2012).

Bagi Prancis, NATO merupakan simbol mata rantai strategi antara Eropa, AS, dan Kanada (Portelli, dkk,2005:198). Dalam posisinya sebagai anggota NATO, Prancis memainkan peran global yang berpengaruh sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, G8, G20, UE, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), WTO, *la Francophonie*, dan lembaga multilateral lainnya. Prancis adalah anggota sebagian besar agen-agen khusus PBB. Prancis mengambil alih kepemimpinan G20 pada tanggal 1 November 2010, dan G8 pada tanggal 1 Januari 2011. Prioritas Prancis selama kepresidenan G20 ialah dalam hal reformasi struktural, seperti reformasi pensiun, investasi di bidang infrastruktur dan pendidikan, dan perbaikan regulasi sektor keuangan, termasuk reformasi global. Prancishubungannya dengan AS merupakan sekutu tertua dalam aliansi pertahanan Atlantik Utara(www.state.gov,2012).

Sebagai anggota UE, Prancis umumnya telah bekerja untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan politik global UE dan perannya dalam pertahanan Eropa. Ini dilihat dalam kerjasama Franco-Jermandan pengembangan Kebijakan Umum Pertahanan dan Keamanan (*Common Security and Defense Policy*/CSDP)dengan anggota UE lainnya sebagai dasar upaya untuk meningkatkan keamanan Eropa. Keterlibatan Prancis di berbagai organisasi internasional di atas, memberikan pengaruh lebih besar bagiPrancisuntuk lebih leluasa dalam menentukan masa depan pertahanan Eropa, terutama hubungannya dengan NATO. Secara garis besar, kepentingan Prancis di NATO ialah "*to take following steps, in keeping with the choices it made in 1996 to move toward a professional army and to define a new model for the armed forces that gives due consideration to the requirement for France's participation in European and Atlantic Alliances"*(www.state.gov,2012).

Berangkat dari tujuan ini, maka Prancis menjalankan misi,pertama, mempertahankan kebebasan Prancis untuk menentukan pilihan bahwa Prancis tetap bebas untuk memilih apakah dalam setiap operasi akan terlibat dengan mitra dan atau dengan sekutu, serta mempertahankan kemampuannya untuk bertindak sendiri jika perlu; Kedua, mempertahankan pengaruhnya di aliansi dan koalisi negaraPrancis, dimana Prancis bertindak sebagai "*framework nation*" untuk melaksanakan misi Eropa (hal ini dapat membantu negarakoalisi Prancis dalam melaksanakan"*framework nation*"dan sebagaipenuntunbagi negara Eropauntuk bersama menggunakan "*its own national headquarter staff*", dan mempertahankan kemampuan militernyaagar tetap efesien dan memadai;Ketiga, mempertahankan kemutakhiran teknologi mengontrol pencegahan nuklir,

mengembangkan sumber daya untuk perlindungan terhadap ancaman baru, dan memperkuat dasar produksi bagi industri pertahanan Eropa. Strategis ini didasarkan padapenangkalan, pencegahan, proyeksi, tindakan, dan perlindungan(www.state.gov,2012).

Kepentingan Prancis di NATO adalah terkhusus pada pertahanan kemanan, sedangkan diarena global, kepentingan Prancis menyangkut seluruh nilai-nilai vital kepentingan Prancis.Untuk itu, reformasi struktur dan postur kekuatan militer Prancis menjadi salah satu domain terpenting di NATO dan Eropa.Doktrin militer Prancis didasarkan pada konsep kemerdekaan nasional, pencegahan nuklir, dan postur militer yang mapan. Untuk itu, revitalisasi struktur militer Prancismenjadi fokus utama dalam meningkatkan kapabilitas militer Prancis. Hal ini sesuai dengan Buku Putih yang dirilis oleh Prancispada Juni 2008 yang menitikberatkan pada masalah pertahanan luar negeri,pertahan domestik, dan masalah keamanan (www.ambafrance-ca.org). Buku Putih itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategi keamanan yang lebih komprehensif untuk jangka waktu 25 tahun ke depan, mencerminkan lingkungan keamanan yang baru pada abad ke-21, dan untuk menguraikan proposal restrukturisasi untuk membuat militer Prancis lebih fleksibel, berteknologi maju, dan lebih mampu berkoordinasi dengan sekutu seperti AS dan organisasi multilateral seperti UE, NATO, dan PBB.

Akhirnya, Prancismemutuskan untuk mulai ikut dalam setiap pengambilan keputusan operasi NATO. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Prancis untuk menaikkan postur kekuatan militer di NATO. Selain itu, dominasi AS di NATO, hari ini dilihat berbeda oleh Prancis. Jika sebelumnya, dominasi AS dilihat sebagai bentuk "*psychology of dependent*" bagi Prancis, maka hari ini tampak berbeda bagi Prancis. Prancis melihat ketidak-terlibatan Prancis dalam setiap pengambilan keputusan di struktur integrasi militer NATO, secara otomatis mengurangi pengaruh Prancis dalam posisinya sebagai anggota NATO. Dengan demikian mengurangi pula pengaruhnya di Eropa, "*More France in NATO means more Europe in the Atlantic Alliance*" (*Mondes*,2010:125), dan sebaliknya pula. Oleh karena itu, Prancis harus ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di struktur militer NATO.

b. Revitalisasi Kepentingan Amerika Serikat di NATO

ASberperan dalam upaya NATO menghadapi tantangan luar biasa abad 21berupa ancaman terhadap terorisme, disintegrasi NATO dan Eropa, dan ancaman terhadap kepentingan nasional negara anggota NATO baik di level regional maupun di level global.

AS bersama anggota lainnya membangun kerja sama untuk masa depan aliansi yang lebihkuat. Kunjungan Menteri Luar Negeri AS di Paris, Hillary R. Clinton menyampaikan prinsip-prinsip yang memandu keterlibatan AS di Eropa secara keseluruhan. Ia juga berbicara secara khusus tentang NATO, menyampaikan garis besar konsep strategis baru NATO, menjelaskan beberapa pertanyaan kunci bagi dokumen strategi NATO, serta mengeksplorasi visi AS untuk revitalisasi aliansi pada abad 21 (www.state.gov,2010).

Revisi Konsep Strategis NATO merupakan domain AS dalam menilai perkembangan aliansi sekaligus merevitalisasi kepentiganAS di NATO.Bagi AS, aliansitelah bertahan karena keahlian para diplomat anggota NATO, kekuatan tentara NATO, dan paling penting ialah kekuatan prinsip-prinsip pendiriannya. Pada saat kelahiran NATO, Eropa masih belum pulih dari konflik. Namun,atas kondisi tersebut, aliansi dibangun untukmengawali tujuan jangka panjang Eropa agar mampu beradaptasi dengan segala bentuk tantangan baru di masa mendatang. Aliansi dibentuk dengan tujuan utama yaitu, pertama, untuk membela kepentingan bangsa-bangsa aliansi Euro-Atlantik. Kedua, NATO sengaja dirancang untuk memperkuat hubungan negara-negara trans-atlantik. Dan ketiga, NATOdiharapkan mampumembantu memfasilitasi integrasi lebih lanjut di antara bangsa-bangsa Eropa (“Remarks at the NATO Strategic Concept Seminar”, www.state.gov,2010).

Selanjutnya, ada tiga tujuan mendasar yang menonjol dalam keterlibatan AS di Eropa. Pertama, AS bekerja dengan Eropa sebagai mitra dalam memenuhi tantangan global. Pada setiap isu kepentingan global, kontribusi Eropa sangat penting untuk memecahkan tantangan keamanan internasional. Dari perang di Afghanistan, tantangan nuklir Iran, dan situasi di Libya–Eropa sangat diperlukan. AS sangat kuat dalam hal legitimasi, sumber daya, dan ide, dan akan lebih baik lagi ketika Eropa bergabung dalam agenda global. Kedua, AS masih bekerja dengan Eropa, bekerja untuk menyelesaikan proyek bersejarah, membantu untuk memperpanjang stabilitas, keamanan, kemakmuran dan demokrasi ke seluruh benua. Suatu keberhasilan yang luar biasa, bahwa AS dan Eropa bisa bersama-sama mempromosikan integrasi Eropa, dalam mengkonsolidasikan dan mendukung demokrasi baru di Eropa Tengah dan Timur, dan mengintegrasikannya ke lembaga Euro-Atlantik. Termasuk upaya perdamaian di Balkan, Eropa timur, dan Kaukasus. Ketiga, AS telah berusaha mengatur hubungan dengan Rusia pada perihal yang lebih konstruktif. Presiden Obama mengakui telah mewarisi situasi yang sulit, dimana secara eksplisit kepentingan AS di NATOmengalami situasi dilema. Hal ini mengingatkepentinganAS di NATO ialah menciptakan kerjasama denganRusia, AS juga

memiliki kepentingan di luar NATO, tetapi tidak mengorbankan prinsip aliansi (Gordon,2011:www.state.gov).

Melihat perkembangan NATOpasca Perang Dingin, NATO telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui peran negara masing-masing. AS telah bekerjasama dengan Eropa yang sebelumnya tidak pernah dilakukandengan mitra Eropa di Afghanistan, di Iran pada pertahanan rudal, dan di Afrika Utara dan Timur Tengah. Kemajuan tersebut adalah, pertama,di Afghanistan, menyusul pidato West Point Presiden pada November 2009, Eropa menyumbang sekitar 7.000 tentara tambahan, lebih dari 100 tim pelatihan bagi tentara Afghanistan dan polisi, dan hampir $300 juta untuk dana tentara nasional Afghanistan dikerahkan. Negara-negara Eropa memiliki 40.000 tentara di Afghanistan dan total kontribusi Eropa di Afghanistan tahun 2001 mencapai$14 miliar (Gordon, 2011).Kedua, di Iran, NATO mempertahankan persatuan dalam upaya untuk terlibat dan pada saat yang sama mengadopsi sanksi berdasarkan keputusan Dewan Keamanan PBB.Ketiga, pada Pertahanan Rudal, sekutu NATO sepakatsesuai dengan KTT Lisbon pada November 2010, bahwa NATO perlu pertahanan baru untuk menangkal ancaman baru, khusuya menangkal rudal balistik dari rezim berbahaya. Keempat, di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah, ASberkonsultasi dan bekerja sama erat dengan NATO.Dalam jangka panjang, AS akan bekerja sama dengan Eropa, Mesir, Tunisia, dan Libya untuk mendorong transisi demokrasi dan meningkatkanpola pembangunan ekonomi untuk membangun kawasan-kawasan strategis di seluruh dunia, termasuk dalam situasi ini adalah pemulihan Libya(Gordon,2011).

Berbagai bentuk keterlibatan dan peran AS seperti yang telah dijelaskan di atas, secara langsung dapat mendorong keanggotaan AS tetap berada dalam posisinya sebagai negara yang paling dominan di NATO. Namun, hal ini tentu saja akan menjadi pertimbangan khusus bagi kebijakan internal AS dan negara anggota NATO lainnya dalam menentukan kebijakan pertahanan NATO di masa mendatang,khususnya bagi keanggotaan Prancis di NATO.

VI. KEBIJAKAN KEAMANAN NATODAN IMPLIKASINYA TERHADAP AGENDA KEAMANAN GLOBAL PASCA PERANG DINGIN

Perimbangan kekuasaan untuk memperoleh dominasi di NATO menjadi isu krusial bagi keanggotaan Prancis dan AS di NATO pasca Perang Dingin. Kembalinya Prancis secara penuh dalam struktur integrasi militer NATO merupakan sebuah langkah taktis bagi

Prancisdalam usaha mengimbangi dominasi AS di NATO dan juga di Eropa. Kembalinya Prancis ke dalam struktur integrasi militer NATO sekaligus memberi legitimasi penuh kepada Prancis untuk memimpin Eropa dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Eropa.

Kepentingan Prancis kembali ke dalam srtuktur integrasi militer NATO secara tegas termuat dalam Buku Putih Konsep Pertahanan Prancis, dimana hal ini menjadi salah satu kepentingan vital Prancis dalam membangun masa depan Pertahanan Eropa yang lebih mandiri. Sesuai dengan Undang-Undang Prancis, 7 Januari 1959, meletakkan tiga dasar bagi tujuan Pertahanan Prancis, yaitu "*to defend France's vital interests, which are defined by the President of the Republic and include its peoples, its territory, and the fredom to exercise its sovereignty; To work for European integration and stability in Europe; and to implement a comprehenshive defence concept, which is not limited to military concern*(Portelli, *2005:*192).Poin kedua konsep pertahanan Prancis "*to work for European integration and stability in Europe*", menjadi dasarkepentingan Prancis di NATO. Salah satu cara untuk memperkuat pencapaian kepentingan nasional Prancis di NATO adalah dengan memperkuat posisinya di Eropa. Untuk itu, Prancis berusaha "*to keep its place in the world, it will need to influence European integration and the coming change in Europe. It is European choice stems from strategic and economic considerations*" (Portelli, *2005:*192). Meskipun Prancis masih bebas menentukan persyaratan keamanan dan untuk memilih sumber daya, Prancis mengakui bahwa NATO adalah link penting antara Eropa dan Amerika, termasukmisi perdamaian dilakukan atas nama PBB atau OSCE. TantanganPrancis di NATO adalah memperbaharui keseimbangan kekuasandi NATOterhadapAS, "*to strike a better balance of responsibilities between the United Stated and Europe and to put these capabilitie to work for peacekeeping missions and crisis management*"(Portelli, *2005:*192).Untuk memperbaharui keseimbangan kekuasaan di NATO, Prancis harus mampu melihat kekuatan AS, seperti kekuatan diplomasi, ekonomi, politik, militer, hukum dan kebudayaan.Sejalan dengan pemahaman di ini,*US Secretary of State*, Hillary R. Clinton menjelaskan bahwa "*every nation should use asmart power*as*the full range of tools at our disposal—diplomatic, economic, military, political, legal and cultural, picking the right tool or combination of tools for each situation. With smart power, dilomacy will be the vanguard of our foreign policy"*(D'Arvor dalam *Mondes*, 2010:214).

AS dan Inggris sebelumnya sangatmenentang rencana Prancisdalammemperlemah NATO (Gardiner, 2012). Namun, Obama telah menekankan bahwa kembalinyaPrancis ke

dalam struktur komando NATO harus diterima. Dan, hal itudiikuti oleh masuknya perwira-perwira Prancisdalam dua posisi komando senior Aliansi: *Allied Command Transformation* (salah satu dari dua komando tertinggiNATO, yang berbasis di Norfolk, Virginia) dan *Joint Command Lisbon* (salah satu dari tiga markas operasi utama NATO, yang juga termasuk Komando Pasukan Reaksi Cepat NATO) (Hall and Blitz,2012). Ini adalah perkembangan yang sangat signifikan yang akan menempatkan Prancis di jantung perencanaan militer NATO dan proposal reformasi dan merupakan sebuah keputusan dan konsesi berisiko oleh Washington ke Pemerintah Sarkozy.Dalam pidato utama pada Konferensi Keamanan Munich pada tanggal 7 Februari2009, Wakil Presiden Joe Biden menyambut baik keputusan Prancis untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam struktur militer NATO dan juga menjelaskan bahwa AS akan mendukung penguatan lebih lanjut pertahanan Eropa (www.securityconference.de,2012).Termasuk peran untukmeningkatkanmisi UE dalam memelihara perdamaian dan keamanan, kemitraan NATO-UE secara fundamental. Pernyataan Biden menggemakan pandangan Sekretaris Pertahanan Inggris John Hutton, yang mendukung rencana Prancis untuk tentara UE (Oakeshott, dalam *The Sunday Times*,*www.timesonline.co.uk,* 2008).

AS dan Inggris harus mengambil langkah taktisatas tuntutan Prancis bagi masa depan NATO. Kongres AS harus melakukan pemeriksaan untuk menilai strategi pemerintahan baru berkenaan dengan reintegrasi Prancis dalam rangka untuk menyorot bahaya yang ditimbulkan kepentingan AS. Ini akan menjadi kesalahan strategis besar penghakiman oleh Pemerintah baru AS dan pemerintah Inggris untuk terus mendukung ambisi Prancis untuk restrukturisasi arsitektur keamanan Eropa. Iniakan membawa Prancis menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dan membawa pengaruh dalam tubuh NATO—kekuatan dan pengaruh baik dari proporsi peran aktual militer Prancis dalam operasi Aliansi. Menyediakan Prancis dengan pengaruh tersebut pada akhirnya akan melemahkan hubungan khusus Anglo-Amerika, pergeseran kekuasaan dari Washington dan London dan menuju benua Eropa, sementara membuka jalan bagi pengembangan identitas pertahanan UE yang terpisah yang semuanya akan melemahkan kekuatan NATO secara global.Presiden Sarkozy, pertama kali melontarkan gagasan reintegrasi Prancis ke komando militer NATO pada Juni 2007, ia menguraikan dua prasyarat,pertama,pos komando dijamin untuk perwira senior Prancis dalam Aliansi, dan kedua,dukungan AS atas peningkatan identitas pertahanan UE (*Agence France-Presse*,2007). Prancis secara resmi menetapkan prinsip reintegrasi, dan Presiden Sarkozy menugaskan Buku Putih pada Pertahanan dan Keamanan NasionalPrancis, yang diterbitkan pada Maret 2008. Dirancang

untuk mempromosikan sebuah identitas independen pertahanan Eropa.Kepentingan PrancisdalamBuku Putih menyatakan “keinginan kuatuntuk membuat UE sebagai pemain utama dalam manajemen krisis dan keamanan internasional merupakan salah satu prinsip kebijakan keamanan Prancis” (www.ambafrance-ca.org,2008). Prancis ingin Eropa harus dilengkapi dengan kemampuan militer dan sipil yang sesuai. Oleh karenanya, redefinisi tanggung jawab pembagian antara AS dan Eropa merupakan sebuah penolakan eksplisit gagasan bahwa UE bertindak sebagai pelengkap sipil untuk NATO.Bagi Prancis, prinsip-prinsip pertahanan Eropa adalah menjadi bagian dari Pertahan Prancis dan bagi negara Eropa lainnya.

Padatahun 2008, Presiden Sarkozy mengumumkan dokumen tambahan Buku Putih yang menguraikan inisiatif kebijakan Paris untuk berintegrasi ke dalam struktur integrasi militer Eropa. Hal ini menyajikan unsur-unsur utama dari identitas pertahanan UE, termasuk di dalamnya adalahpertama, sebuah markas operasi permanen di Brussel; kedua,pendanaan untuk setiap operasi militer Umum UE; dan ketiga, program pertukaran personil militer Eropa (Taylor danWintour dalam *The Guardian*,2008). Ketiga poin penting ini merupakan tambahan bagi kebijakan Prancis seperti yang tertuang dalam Buku Putih Prancis, sekaligus sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan politik luar negeri Prancis di NATO dan juga di Eropa.Pemerintahan Obama akan menganggap reintegrasi Prancis ke dalam NATO sebagai ketegangan diplomatik. Pemerintah AS akan mengklaim bahwa Presiden Obama telah membangun kembali hubungan Prancis-Amerika dengan cara yang saling menguntungkan, dan Sarkozy pada gilirannya akan mengklaim bahwa itu secara nyata menunjukkan komitmen Prancis untuk berdiri di samping Amerika. Namun, PemerintahAS harus mengkaji ulang apa keuntungan ASterhadap perihal ini. Reintegrasi tersebut dapat mengekstrak beberapa ratus tentara Prancis tambahan untuk Afghanistan timur dan menghasilkan dukungan kuat publik Prancis untuk misi Afghanistan. Tapi Presiden Obama menjelaskan bahwa AS telah menyelamatkan aliansidengan jalanmeloloskan kepentingan Prancis. Alasan AS meloloskan kepentingan Prancis adalah karena Prancismampu melakukan reformasi militer di NATO.Hal ini dibuktikan pada tahun2007, dimana sebanyak 700 tambahan tentara Prancis dikirim ke Afghanistan.Padahal,dalam periode tersebut belanja pertahanan Eropamengalami penurunan dalam10 tahun sebelumnya.

Washington terus berpendapat bahwa mendukung Keamanan Eropa dan Kebijakan Pertahanan adalah sarana untuk memperbaiki anggaran pertahanan Eropa dan kemampuan militer. Tapi setelah 10 tahun, peningkatan tersebut belum terjadi dan tidak tercermin

dalam anggaran pertahanan Eropa. Karena UE dan NATO beroperasi di wilayah yang sama baik secara militer dan geografis, kompetisi untuk sumber daya semakin memanas, dan Washington melihat permintaan untuk bantuan militer kemungkinan semakin ditolak seperti tuntutan Prancis untukberkomitmen dalam misi pertahanan UE (www.ambafrance-ca.org,2008).Setelah AS berhasil memberikan bantuan penciptaan struktur pertahanan Eropa yang terpisah, tidak akan ada alasan untuk memaksa Eropa untuk memilih NATO atas permintaan UE di masa depan. Daripada benar-benar mencoba untuk meningkatkan kontribusi Eropa untuk pertahanan di panggung internasional, Prancis berusaha untuk memperluas pertahannya dan basis kekuatan UE. Usulan Sarkozy sebagian besar bersifat politik, bukan militer. Dalam prakteknya, Prancis sudah terlibat hampir di semua struktur dan operasiNATO, termasuk semua badan politik dan juga *NATO Response Force*. Hal inimenjadi keberhasilan Prancismencapai kepentingannya di NATO.Reintegrasi Prancis dalam struktur komando NATO menawarkan sedikit nilai tambahan bagi Washington, tapi memberikan momentum luar biasa bagikepentinganPrancis untuk otonomi UE terkait kebijakan luar negeri dan pertahanan. Ketika Presiden Prancis berbicara tentang kebijakan luar negeri Eropa, ia lebih sering menekankan pada kebijakan luar negeri Prancis. Sama, ketika Sarkozy berbicara tentang meningkatkan kemampuan keamanan Eropa, berarti mengurangi keterlibatan AS di Eropa (www.ambafrance-ca.org,2008).

Sebagai contoh, pada Januari 2007 UE mendirikan pusat operasi militer di Brussels, yaitu "*European Security and Defense Policy*" (ESDP) yang pada tahun itu dilakukanlatihan sembilan hari yang melibatkan penyebaran 2.000 tentara Eropa untuk menangani krisis di negara operasi NATO (*International Herald Tribune*,2007). Pusat operasional ini menjadi markas besar komando militer UE yang pada akhirnya akan bersaing dengan komando NATO. Usulan Pranciskepada ASuntuk melakukan reformasi struktur pertahanan Eropa yang independen dibangun di atas fondasi markas militer UE yang baru. Jika AS setuju atas rencana Prancis, maka hal itu merupakan sebuah pembalikan pengaturan baru bagi keanggotaan Prancis dan menciptakan erosi yang lebih lanjut bagi supremasi NATO di Eropa.

Ke depannya, amat sulit untuk melihat bagaimana kemampuan pertahanan UE mampu memperkuat misi NATO secara luas.Mendorong peran militer yang lebih besar bagi UEakan membuat tugas NATO lebih rumit. NATO telah menjadi organisasi multilateral pascaperang yang paling sukses,danoleh karena itu sistem pertahanan dan aliansi keamanan yang independen di negara-negara Eropa perlu diciptakan. Usulan Prancis untuk membangun struktur pertahanan UE yang terpisah, yaitusebuah pesaing bagi

NATO menyedot sumber daya berharga NATO. Oleh karena itu, tidak dapat diterima dan harus ditolak dengan tegas oleh AS.Bagi Prancis, memperkuat sistem pertahanan Eropa melalui peningkatan postur militer UE di Eropa penting bagi kepemimpinan Prancis di Eropa. Ini dilakukan dengan cara memasukkan perwira Prancis dalam dua posisi Komando Senior Aliansi: *Allied Command Transformation* (ACT) yaitu satu dari dua komando tertinggi NATO yang berbasis di Norfolk, Virginia; dan *Joint Command Lisabon* (*JCL*) yaitu satu dari tiga markas operasi utama NATO,juga termasuk Komando Pasukan Reaksi Cepat NATO. Langkah iniuntuk mencapai cita-cita Eropa seperti yang tertulis dalam Buku Putih Prancis.Semua perwujudan ini menandai kuatnya pengaruh Prancis dan AS di NATO yang pada akhirnya turut mempengaruhi agenda keamanan global.Pada akhirnya, kebijakan keamanan NATO adalah cermin kebijakan keamanan dunia.

VII. KESIMPULAN

Buku Putih Prancis tahun 2008 menegaskankepentingan Prancisuntuk memperbaharui keseimbangan kekuasaan di NATO.Oleh karena itu,Prancisterfokus untukmembangun sistem pertahanan Eropa yang lebih kuat, berdiri sebagai prioritas, dan menjadikan Eropa sebagai pemain utama dalam manajemen krisis dan keamanan internasional.Sebaliknya, kepentingan AS sesuai dengan mandat *US National Security* adalah mempertahankan posisinya sebagai negara terkuat di NATO, menjadi aktor utama dalam arena internasional di Eropa, dan menjaga kredibilitasnya sebagai negara superpower di Eropa. Hal ini bertujuan menjaga aliansi tetap relevan, tidak punah, dan mampu bertahan terhadap berbagai jenis ancaman baru abad 21.PengaruhPrancis dan ASterletak pada redefenisi tanggung jawab (*Structure*), pembagian tugas (*Planning*), dan pengambilan kebijakan (*Operation*) NATO.Gagasan redefinisi tanggung jawab menjadikrusial bagikepemimpinan Prancis dan AS di NATO pasca Perang Dingin yang dalam jangka panjang memiliki implikasi pada agenda keamanan global di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, Adi Rio (2012),*Rivalitas Prancis-Amerika Serikat di North Atlantic Treaty Organization (NATO) Pasca Perang Dingin* (Skripsi),Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Anonim (2008),*Power dan Kapabilitas Negara-Bangsa dalam Pengantar Hubungan Internasional.* Surabaya: Universitas Airlangga.

Augustin, Sankt (2007),*Konrad Adenauer and the European Integration*. Berlin: Konrad Adenauer Fundation.

Bakry, Umar Suriadi(1999),*Pengantar Hubungan Internasional*.Jakarta: Jayabaya University Press.

Banyu, A. A., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Coplin, William D. (1992),*Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis.*Bandung: CV Sinar Baru.

Dougherty, James E. dan Robert L. Pfatzgraff, Jr.(1971),*Contending Theories in International Relations*. New York: JB.Lippncot CO.

Firdausy, Arsi Dwinugra (1998),*Motivasi Hongaria Masa Pemerintahan Koalisi Konservatif Untuk Bergabung Dengan NATO* (Skripsi), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Yogyakarta: UGM.

Griffiths, Martin dan O'Callaghan, Terry (2002),*International Relations: The Key Concepts*. London: Routledge.

Jones, Walter S. (1992),*Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jones, Walter S. (1993),*Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mas'oed, Mohtar (1990),*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Morgentahau, Hans J.(1990),*Politik Antarbangsa: Perjuangan Untuk Kekuasaan dan Perdamaian*. Bandung: MANNA, Lembaga Penterjemahan dan Penyaduran.

Portelli,Hugues, dkk. (2005),*France.* Paris: La Documentation Francaise; Ministere des Affaires etrangeres.

Rimanelli, Marco (2009),*Historical Dictionary of NATO and other International Security Organizations*. United Stated of America: Scarecrow Press, Inc.

Rudy, T May (2002),*Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sarkesian, Sam C., Williams, John Alens and Cimbala, Stephen J. (2008),*US National Security*: *Policymakers, Processes, and Politics*. Unites States of America: Lynne Riener Publishers, Inc.

Schelling, T. C. (1966), *The Diplomacy of Violence*. New Haven: Yale University Press.

Sheehan, Michael (1996),*The Balance of Power: History and Theory.* New York: Routledge Publishing.

Soeprapto, R. (1997),*Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sriyono, A. Agus, dkk.(2004),*Hubungan Internasional, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Theodore A. Columbis dan James H. Wolfe (1990), *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. Bandung: Abardin.

Yusuf, Sufri (1989),*Hubungan Internasional & Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ziring, Laurence., Plano, Jack C., Olton, Roy (1995),*International Relation: A Political Dictionary*. California: ABC-CLIO, Inc.

Jurnal dan Dokumen:

Chapelle, Bertrand De La. Automne (2010). "Territoire, Puissance et Gouvernance a l'ere Numerique", dalam *MONDES; Les Cahiers du Quai D'Orsay*, No. 5.

D'Arvor, Olivier Poivre (Winter, 2010). "The Smart Use of Soft Power", dalam *MONDES; Les Cahiers du Quai D'Orsay*, No. 2.

French White Paper on Defence and National Security, June 2008.

Huth, P. K. (1999). "Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debate," dalam *Annual Review of Political Science*, No. *2*.

Jentleson, B.A., dan Whytock, C.A. (Winter 2005). "Who Won Libya", dalam *International Security*, Vol. 30, No. 3.

Lasas, Ainius (2008). "Restituting Victims: EU and NATO Enlargements through the Lenses of Collective Guilt", dalam *Journal of European Public Policy*.

Mariani, Renato (2004). "Book Review: Frank Schimmelfennig, The EU, NATO and the Integration of Europe: Rules and Rhetoric", *Journal of International Studies*,Vol. 33.

NATO Handbook 2006, "NATO's Public Diplomacy Division", Brussel.

NATO New Strategic Concept, 2010.

Pierre Lellouche, Winter, 2010, "European Defense, a challenge for the New Europe,", dalam *MONDES; Les Cahiers du Quai D'Orsay*

Presse, Agence France (25 September 2007). "Debate Still Open on NATO Integration", dalam *French Defence Officials*.

Spero, Joshua B. (2005). "Resensi Buku: Schimmelfennig Frank, Uni Eropa, NATO dan Integrasi Eropa dan Retorika Aturan", dalam *Review Slavia.*

Website:

"Background Note: France" diakses pada pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 pukul 09.44 WIB dari http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3842.htm

"Command Accord Presages French Return to NATO," *Financial Times*, February 5, 2009,diakses pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 pukul 09.44 WIBdari http://www.ft.com/cms/s/0/fbc2122a-f323-11dd-abe6-0000779fd2ac.html

"Declaration on Peace and Cooperation, 08 November 1991", diakses pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012 pukul 23.07 WIB darihttp://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23846.htm

"European HQ Heads Sarkozy Plan for Greater Military Integration," *The Guardian*, June 7, 2008,diakses pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 pukul 09.55 WIBdari http://www.guardian.co.uk/world/2008/jun/07/eu.france

"EU Says NATO Will Benefit from New European Military Center," *International Herald Tribune*, June 13, 2007,diakses pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 pukul 09.56 WIB dari http://www.iht.com/articles/ap/2007/06/13/europe/EU-GEN-EU-Military.php.

"French White Paper on Defence and National Security, June 2008,"diakses pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 Pukul 10.00 WIB dari http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/,livre_blanc_press_kit_english_version.pdf

"John Hutton Backs European Army", *The Sunday Times*, October 26, 2008,diakses pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 pukul 09.59 WIB dari http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article5014832.ece

"NATO's Vision and Mission", diakses hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2012 pukul 07.00 WITAdari http://www.nato.int/cps/en/natolive/nato_programs.htm

"Overview of U.S. Relations with Europe and Eurasia Testimony", Philip H. Gordon, Assistant Secretary, Bureau of European and Eurasian Affairs, House Foreign Affairs Subcommittee on Europe and Eurasia, Washington, DC, March 10, 2011, diakses pada hari Jum'at 20 Januari 2012 pukul 11.45 WIB dari http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2011/158214.htm,

"Pidato Perdana Menteri Francois Fillon on France Parlemen, 2009", diakses pada hari Selasa, tanggal 8 November 2011 pukul 22.35 WITA dari http://www.voanews.com/indonesian/news/a-32-2009-03-21-voa8-85126987.html,

"Remarks at the NATO Strategic Concept Seminar", Remarks Hillary Rodham Clinton, Secretary of State Ritz-Carlton Hotel Washington, DC February 22, 2010",

diakses pada hari Jum'at 20 Januari 2012 pukul 10.00 WIB darihttp://www.state.gov/secretary/rm/2010/02/137118.htm

"Text of the North Atlantic Treaty, 4 April 1949", diakses pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2011 pukul 23.30 WITA darihttp://www.nato.int/cps/en/natolive/official_ext_17120.htm

"The State Department's Role in NATO Deterrence and Defense Posture Review (DDPR) and Future Arms Control", diakses pada hari Jum'at 20 Januari 2012 pukul 10.30 WIB dari http://www.state.gov/t/us/176669.htm

"The U.S. and U.K. Must Oppose French Plans to Weaken NATO", Nil Gardiner Ph.D. Direktur, Sally McNamara, dan Erica Munkwitz (Analis Kebijakan Senior Eropa di *The Margaret Thatcher Center for Freedom* di *Heritage Foundation*),diakses pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 Pukul 15.55 WIBdari http://www.heritage.org/research/reports/2009/02/the-us-and-uk-must-oppose-french-plans-to-weaken-nato

"United Nations Resolutin 1973, 17 Maret 2011", diakses pada hari Selasa, tanggal 8 November 2011 pukul 22.30 WITA dari http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm

"Vice President Joseph R. Biden, speech at the 45th Munich Security Conference", diakses pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 pukul 09.59 WIB dari http://www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2009=&menu_konferenzen=&sprache=en&id=238&